

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang mana sebagai auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Selain penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi

untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang berlatar belakang pendidikan dibidang akuntansi maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Peraturan Pemerintahan ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. (Nordiawan, 2009:25).

Menurut Delanno (2013:24), pemanfaatan teknologi informai adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari bagian akuntansi atau keuangan memiliki komputer yang cukup untuk

melaksanakan tugas, jaringan internet telah terpasang di unit kerja, jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman dan data informasi yang dibutuhkan, proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi, pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* sesuai dengan peraturan perundang-undangan, laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi, adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur, peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang ada. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang system informasi keuangan daerah. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi ini yaitu mempercepat proses transaksi, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan kemampuan multiprocesing.

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya pengendalian internal berfungsi untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern akuntansi yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau

perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan.

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintahan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian dari Dewi, dkk (2014), meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintahan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintahan pada SKPD di Kabupaten Buleleng.

Mokoginta, Novtania., dkk. (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan hasil penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Siahayu, Erwin., dkk. (2017) meneliti mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD) provinsi papua.

Armel, (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti menemukan bahwa kompetensi SDM, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Rahmawati, Astika., dkk. (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang selatan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ramadhani, Melati., dkk. (2018) meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern (SPI), pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Baten.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga penelitian ini sangat menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, Melati., dkk (2018)

dengan judul “Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan mengganti satu variabel independen yaitu pemahaman basis akrual menjadi penerapan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Boyolali?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Boyolali?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Boyolali?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menganalisa pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Boyolali.
3. Untuk menganalisa pengaruh Pemanfaatna Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Boyolali.
4. Untuk menganalisa pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan, terutama dalam hal memaksimalkan kinerja di dalam pemerintahan.

2. Bagi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah referensi mengenai kualitas laporan keuangan, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi topik utama penelitian untuk melakukan penelitian. Dengan adanya latar belakang tersebut, kemudian muncul beberapa rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini berisi telaah literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk membangun atau merumuskan hipotesis penelitian serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi informasi tentang subjek penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi tentang simpulan berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian serta menjawab hipotesis penelitian dan hasil tambahan lainnya, selanjutnya berisi saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian dan juga untuk penelitian selanjutnya.